

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR: STUDI KASUS DESA SIMPANG PADANG, KECAMATAN BATHIN SOLAPAN, KABUPATEN BENGKALIS

***Geri Wardana¹ & Zainal²**

^{1,2}Program Sudi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: geriwardana@student.uir.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Village Head in the planning, implementation and supervision of infrastructure development in Simpang Padang Village, Bathin Solapan Sub-district, Bengkalis District. The study employs a qualitative descriptive approach, with data collected through structured interviews, direct observation and documentation. The research informants comprised the Village Head, the Village Secretary, the Head of Development Affairs, the Hamlet Heads, and the Village Facilitator. The research findings indicate that the Village Head plays an active role in coordinating village officials and the community, ensuring a participatory decision-making process, overcoming development obstacles through public awareness campaigns and consensus-building deliberations, and conducting direct supervision of project implementation in the field. Infrastructure development has a positive impact on community welfare, particularly in terms of improving the quality of roads and public facilities. However, development is still being carried out in stages due to budgetary constraints and local conditions. This study emphasises the importance of participatory governance, effective coordination, and adaptive leadership in supporting the success of rural infrastructure development.

Keywords: Village Head, Infrastructure Development, Community Participation, Governance, Rural Development

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek mendasar dalam pembangunan pedesaan yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, aksesibilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan lokal. Di Indonesia, kepala desa memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan terkait lainnya. Kepemimpinan kepala desa sangat menentukan keberhasilan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, terutama pada desa yang baru berkembang atau mengalami pertumbuhan yang pesat.

Desa Simpang Padang yang terletak di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, sedang mengalami perkembangan pembangunan infrastruktur yang cukup aktif, meliputi pembangunan jalan, drainase, dan berbagai fasilitas umum. Keberhasilan pembangunan di wilayah pedesaan memerlukan koordinasi yang baik antara perangkat desa, masyarakat, dan lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

Walaupun demikian, terdapat berbagai tantangan yang dapat menghambat proses pembangunan, seperti kondisi alam, perubahan cuaca musiman, dan adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana kepala desa mengelola proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk menilai efektivitas kepemimpinan dan praktik tata kelola pemerintahan dalam pembangunan pedesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Padang melalui tiga aspek utama, yaitu: (1) Proses perencanaan pembangunan. (2) Koordinasi dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pembangunan. (3) Partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Melalui analisis terhadap ketiga aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan strategi pembangunan pedesaan yang efektif.

Pemerintahan merupakan mekanisme yang terstruktur dalam mengelola, mengatur, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan dapat dipahami secara luas sebagai fungsi lembaga legislatif dan yudikatif dalam menjaga hukum dan keadilan, sedangkan secara sempit diartikan sebagai pelaksanaan administrasi sehari-hari oleh lembaga eksekutif.

Ermaya Suradinata menjelaskan bahwa pemerintahan mencakup seluruh aktivitas lembaga publik dalam mencapai tujuan negara. Menurut Rasyid, tugas pokok pemerintahan meliputi: a. Menjamin keamanan internal dan eksternal; b. Menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial; c. Menciptakan regulasi yang adil; d. Menyelenggarakan pelayanan publik secara menyeluruh. Pelaksanaan pemerintahan sering menghadapi hambatan sosial baik antarindividu maupun antarkelompok sehingga diperlukan tata kelola yang partisipatif dan demokratis.

Desa memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia sebagai garda terdepan pelayanan publik. Desa tidak hanya berfungsi sebagai unit administrasi, tetapi juga sebagai pusat pelestarian budaya, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan lokal, melaksanakan pembangunan, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat praktik demokrasi di tingkat akar rumput. Kepala Desa memiliki tanggung jawab utama dalam: (1) Menyelenggarakan pemerintahan desa. (2) Melaksanakan pembangunan desa. (3) Membina kehidupan masyarakat desa. (4) Memberdayakan masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, visi, serta kemampuan kepala desa dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat.

Peran kepala desa mencakup tanggung jawab normatif, ideal, dan faktual. Peran normatif berlandaskan norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran ideal sesuai dengan harapan terhadap jabatan kepala desa. Peran faktual berkaitan dengan tindakan nyata dalam kondisi yang dihadapi. Peran tersebut meliputi: a) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa; b) Mengawasi proyek pembangunan infrastruktur; c) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Mengelola sumber daya administrasi, keuangan, dan sosial untuk mendukung pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan penentu utama pembangunan yang berkelanjutan, yang melibatkan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program (Suryono, 2001; Slamet, 2003; Isbandi, 2007). Partisipasi memastikan bahwa inisiatif pembangunan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat serta mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Partisipasi yang efektif mengintegrasikan pengetahuan lokal, nilai-nilai, dan struktur sosial ke dalam proses tata kelola (Handayani, 2006; Supriady, 2005).

Infrastruktur adalah fondasi bagi kegiatan sosial dan ekonomi, yang mencakup fasilitas fisik yang memungkinkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi (Stone, 1974 dalam Kodoatie, 2005). Di daerah perdesaan, infrastruktur seperti jalan, drainase, dan utilitas publik secara langsung memengaruhi akses ke pasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan secara menyeluruh (Subandi, 2011; Rochajat dkk., 2011). Tata kelola yang baik, kepemimpinan, dan mekanisme partisipatif sangat krusial untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan secara adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan literatur yang ada, penelitian ini menyusun kerangka konseptual yang menghubungkan peran kepala desa, koordinasi dan kepemimpinan, partisipasi masyarakat, serta hasil pembangunan. Kerangka ini mengasumsikan bahwa kepemimpinan yang efektif dan keterlibatan masyarakat yang aktif berpengaruh positif terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur desa, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, praktik kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa (Creswell, 2013; Herdiansyah, 2014). Penelitian ini dilakukan sebagai penelitian lapangan yang berfokus pada pemahaman mengenai bagaimana kepala desa menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, serta penyelesaian masalah dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia.

Desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara aktif melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur serta menyediakan kondisi yang sesuai untuk mengkaji peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan pedesaan. Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan individu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan desa. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari individu yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.

Penelitian ini melibatkan lima informan kunci yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Pendamping Desa, dan Kepala Dusun. Para informan tersebut dianggap mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai perencanaan pembangunan, proses pelaksanaan, partisipasi masyarakat, mekanisme pengawasan, serta berbagai kendala yang dihadapi selama kegiatan pembangunan infrastruktur berlangsung. Untuk meningkatkan kredibilitas data, informasi yang diperoleh dari satu informan dibandingkan dan diverifikasi dengan informasi yang diperoleh dari informan lainnya melalui teknik triangulasi, sehingga keakuratan dan keabsahan data penelitian dapat terjamin.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 1. Observasi; Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan pembangunan, keterlibatan perangkat desa, serta partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan infrastruktur. Melalui observasi, peneliti dapat memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan. 2. Wawancara; Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada seluruh partisipan penelitian. Wawancara difokuskan pada mekanisme perencanaan pembangunan, praktik kepemimpinan, proses koordinasi, partisipasi masyarakat, kendala pembangunan, serta strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. 3. Dokumentasi, Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi pendukung yang berasal dari arsip pemerintah desa, laporan pembangunan, peraturan desa, foto-foto kegiatan, dokumen perencanaan, serta berbagai dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.

Data dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi

(Sugiyono, 2010); a) Reduksi Data; Pada tahap ini, transkrip wawancara, catatan hasil observasi, dan dokumen pendukung disusun, dipilih, serta disederhanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Informasi yang relevan mengenai peran kepala desa dan pembangunan infrastruktur dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut; b) Penyajian Data; Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan proses interpretasi serta mengidentifikasi pola-pola yang muncul terkait kepemimpinan, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan hasil pembangunan; c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi; Tahap akhir dilakukan dengan menafsirkan temuan penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan tema serta pola yang berulang. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan penelitian.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai partisipan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan keterlibatan yang cukup lama di lapangan, observasi yang cermat, serta verifikasi dokumen guna meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Koordinasi dan Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Pembangunan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa koordinasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Kepala Desa menjalin komunikasi yang berkelanjutan dengan perangkat desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait. Rapat koordinasi dilaksanakan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami tujuan pembangunan dan prosedur pelaksanaannya. Kepala Desa menunjukkan gaya kepemimpinan yang partisipatif dengan melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan pembangunan di lapangan, tidak hanya bergantung pada laporan administratif. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah secara cepat serta memudahkan pengambilan tindakan korektif yang tepat waktu.

Menurut Ndraha (2011), pemerintahan melibatkan interaksi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa telah menjalankan fungsi pemerintahan tersebut secara efektif dengan membangun kerja sama di antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan. Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Kepala Desa juga sejalan dengan konsep good governance yang dikemukakan oleh Munaf (2015), yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Melalui pengawasan aktif dan keterlibatan para pemangku kepentingan, Kepala Desa memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan bahwa proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor terpenting yang mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Padang. Masyarakat secara aktif terlibat dalam rapat perencanaan, diskusi pembangunan, kegiatan pengawasan, serta program kerja bakti atau gotong royong. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat didorong untuk memberikan masukan terkait prioritas pembangunan dan dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan proyek di lingkungan masing-masing. Pendekatan ini memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan sekaligus meningkatkan transparansi dalam pelaksanaannya.

Temuan ini mendukung pendapat Suryono (2001) yang menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Sejalan dengan itu, Isbandi (2007) menegaskan bahwa partisipasi mencakup keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, melaksanakan program, serta mengevaluasi hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat di Desa Simpang Padang juga mencerminkan prinsip partisipasi warga negara dan partisipasi sosial sebagaimana dikemukakan oleh Slamet (2003). Melalui musyawarah yang dilakukan secara rutin dan berbagai kegiatan kolaboratif, masyarakat tidak hanya menyumbangkan tenaga dan gagasan, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial yang membantu menjamin akuntabilitas pelaksanaan proyek pembangunan.

Kendala dalam Pembangunan Infrastruktur

Meskipun kegiatan pembangunan pada umumnya berjalan dengan baik, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hambatan yang paling sering muncul adalah kondisi cuaca yang kurang mendukung, terutama curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek infrastruktur. Kendala lainnya adalah adanya perbedaan pendapat di antara masyarakat terkait proyek pembangunan tertentu. Dalam beberapa kasus, warga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan maupun aktivitas sehari-hari mereka. Perbedaan pandangan tersebut terkadang menyebabkan pelaksanaan proyek tertunda hingga tercapai kesepakatan bersama.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Subandi (2011) yang menyatakan bahwa proses pembangunan sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun faktor sosial. Rogers (dalam Rochajat dkk., 2011) juga menjelaskan bahwa perubahan sosial dan program pembangunan dapat menghadapi penolakan dari individu atau kelompok yang merasa dirugikan oleh perubahan yang direncanakan. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi masih dapat dikelola dengan baik dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap keseluruhan proses pembangunan.

Strategi Mengatasi Kendala Pembangunan

Untuk mengatasi berbagai kendala pembangunan, Kepala Desa menerapkan pendekatan yang partisipatif dan komunikatif. Permasalahan yang muncul akibat perbedaan pendapat masyarakat diselesaikan melalui konsultasi, dialog, dan upaya membangun kesepakatan bersama. Perangkat desa memberikan penjelasan mengenai tujuan proyek, manfaat yang akan diperoleh, serta dampak yang mungkin timbul guna meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pembangunan.

Dalam menghadapi kendala cuaca, jadwal pelaksanaan proyek disesuaikan untuk meminimalkan gangguan tanpa mengurangi standar kualitas pekerjaan konstruksi. Pendekatan yang fleksibel ini memungkinkan kegiatan pembangunan tetap berjalan dengan baik tanpa mengorbankan hasil yang diharapkan. Strategi tersebut menunjukkan peran Kepala Desa tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai mediator. Menurut Ndraha (2003), aparatur pemerintah harus mampu menjaga keharmonisan sosial sekaligus mengelola kepentingan publik. Pendekatan komunikasi yang diterapkan di Desa Simpang Padang menunjukkan praktik manajemen konflik dan keterlibatan masyarakat yang efektif.

Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kondisi jalan, sistem drainase, dan fasilitas umum telah meningkatkan aksesibilitas, mengurangi kesulitan transportasi, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Masyarakat menyatakan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap hasil

pembangunan, terutama di wilayah yang sebelumnya memiliki kondisi jalan yang rusak parah. Meskipun pembangunan belum menjangkau seluruh wilayah desa, strategi pelaksanaan secara bertahap memungkinkan kebutuhan yang paling mendesak untuk dipenuhi secara efektif.

Temuan ini mendukung teori pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow (dalam Abdul, 2004), yang memandang pembangunan sebagai proses bertahap yang bertujuan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Demikian pula, Subandi (2011) menyatakan bahwa pembangunan pada akhirnya harus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif yang terlihat di Desa Simpang Padang menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang efektif, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, serta investasi infrastruktur yang strategis dalam mendukung pembangunan pedesaan.

KESIMPULAN

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek mendasar dalam pembangunan pedesaan yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, aksesibilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan lokal (Soekanto, 2017). Di Indonesia, kepala desa memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan terkait lainnya. Kepemimpinan kepala desa menentukan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, khususnya di desa-desa yang baru berkembang atau mengalami pertumbuhan yang pesat. Desa Simpang Padang yang terletak di Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, sedang mengalami pembangunan infrastruktur yang aktif, meliputi pembangunan jalan, drainase, dan berbagai fasilitas umum. Pelaksanaan pembangunan yang efektif dalam konteks pedesaan seperti ini memerlukan koordinasi antara perangkat desa, masyarakat, dan lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat guna menjamin keberlanjutan dan penerimaan terhadap hasil pembangunan (Ndraha, 2011; Suryono, 2001).

Meskipun berbagai upaya pembangunan telah dilakukan, tantangan seperti kondisi alam, perubahan cuaca musiman, dan sesekali adanya penolakan dari sebagian masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana kepala desa mengelola proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas kepemimpinan dan praktik tata kelola pembangunan di pedesaan (Subandi, 2011; Rochajat, 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Simpang Padang dengan menelaah tiga aspek utama, yaitu: (1) proses perencanaan pembangunan, (2) koordinasi dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pembangunan, serta (3) partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Melalui analisis terhadap ketiga aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan strategi pembangunan pedesaan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2004). *Membangun Desa Partisipatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adi, I. R. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bratakusumah, D. S., & Riyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Handayani, S. (2006). *Perlibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif*. Surakarta: Kompip Solo.
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kaho, J. R. (2002). *Prospek Otonomi Daerah: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen* (2nd ed.). Jakarta: Bina Aksara.
- Munaf, Y. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2010). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (3rd ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Ndraha, T. (2010). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rochajat, H., et al. (2011). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Yayasan Dian Desa.
- Slamet, M. (2003). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor: IPB Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (Revised ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. (2001). *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Thoha, M. (2003). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Veithzal, R. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. (2012). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. (2013). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yuwono, T. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Diponegoro University Press.
- Zaidan Nawawi. (2013). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.